

Jokowi Bahas soal Daerah Pemekaran Bersama Delegasi MRP dan MRPB

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo menerima delegasi pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di Istana Merdeka, Senin (25/4). Salah satu hal yang dibahas yakni soal otonomi daerah baru atau pemekaran Papua. “Memang terjadi pro-kontra (pemekaran Papua). Ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi tidak ada sesuatu pun di negeri ini yang langsung disetujui oleh semua orang,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD, saat memberikan keterangan pers usai pertemuan.

“Oleh karena itu, presiden menjelaskan berdasarkan data, bahwa sebenarnya untuk minta pemekaran di berbagai daerah itu rebutan,” lanjut Mahfud. Mahfud menjelaskan, ada 354 permohonan pemekaran wilayah di Indonesia. Lalu berdasarkan kepentingan di Papua, pemerintah pusat mengabdikan pemekaran untuk tiga provinsi pulau Cenderawasih itu.

“Kalau ada yang setuju dan tidak setuju biasa. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan itu malah 82 persen itu memang rakyat Papua itu memang minta pemekaran itu, minta mekar,” ungkap Mahfud. “Dan di sana kalau mau bicara setuju tidak yang terbuka ke publik sama-sama banyak. Yang unjuk rasa mendukung, unjuk rasa yang tidak. Oleh sebab itu, tadi pertemuan berjalan baik dan tidak perlu tidak ada keputusan baru,” lanjutnya. Selain soal pemekaran, pertemuan Jokowi dan tokoh Papua itu juga membahas Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Mahfud menerangkan, saat ini ada yang mengajukan uji materi aturan tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia pun meminta semua pihak untuk menghargai proses dan menerima putusan dari MK nanti. “Kita hargai proses hukum dan kita akan ikuti dan tentu saja pada akhirnya akan berujung pada vonis,” kata Mahfud. ● **han**

Polhukam

FOTO/ANT



MUHAIMIN ISKANDAR BERTEMU DUTA BESAR UE UNTUK INDONESIA

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (kedua kiri) memberikan cinderamata kepada Duta Besar UE untuk Indonesia Vincent Picket (kiri) disaksikan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (kedua kanan) dan Anggota DPR fraksi PKB Anggia Erma Rini (kanan) usai melakukan pertemuan secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4). Pertemuan tersebut membahas perkembangan konflik Rusia-Ukraina.

Sidang Perdana Gugatan UU IKN, MK Soroti 53 Kuasa Hukum yang Terlibat

JAKARTA (IM) - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyortir jumlah kuasa hukum yang dilibatkan Busyro Muqoddas dkk selaku pemohon uji formal Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam sidang perdana, Senin (25/4), majelis hakim yang terdiri dari Aswanto, Saldi Isra, dan Manahan Sitompul, mengingatkan soal “kesan” yang ditimbulkan dari jumlah kuasa hukum yang cukup gemuk ini. Sebab, dari 53 kuasa hukum namanya tercantum dalam permohonan, baru 28 di antaranya yang membubuhkan tanda tangan.

“Ini banyak yang tidak tanda tangan kami seolah berasumsi, orang ini jangan-jangan coba-coba saja atau paling tidak numpang beken namanya ada di permohonan ini. Kan ini pasti jadi perhatian,” ungkap Saldi.

Majelis hakim juga menyortir soal teknis penulisan permohonan yang dianggap belum sesuai ketentuan. Majelis hakim memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan untuk melakukan perbaikan hingga 14 hari ke depan.

Berdasarkan draf permohonan yang diunduh dari situs MK, terdapat 6 orang pemohon dalam perkara nomor 54/PUU-XX/2022 ini. Enam pemohon itu yakni Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas sebagai dosen, Trisno Raharjo (dosen), YD (ibu rumah tangga/warga Sepaku terdampak IKN), Dwi Putri Cahayanti (Dekan FH Universitas Muhammadiyah Jakarta).

Kemudian Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMANI) diwakili Sekjen Rukka Sombolinggi, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) diwakili Ketua Pengurus Zenzi Suhadi dan Sekretaris Pengurus M Ishlah. ● **han**

Sudah Banyak Gubernur Usulkan Nama Calon Penjabat Kepala Daerah

Untuk penjabat Kepala Daerah setingkat Bupati dan Wali Kota, Kemendagri telah mendapatkan usulan nama dari Gubernur yang masih menjabat di wilayah tersebut.

JAKARTA (IM) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku telah mengantongi sejumlah nama calon penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk mengisi jabatan Gubernur, Bupati atau wali Kota yang masa jabatannya bakal berakhir di tahun 2022.

BEM Nusantara Kecam Keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia

JAKARTA (IM) - Sekretaris Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Ridho Alamsyah, mengancam keras munculnya Partai Mahasiswa Indonesia (PMI).

Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro menyatakan, telah menerima beberapa usulan nama untuk mengisi 101 jabatan kepala daerah yang jabatannya bakal berakhir tersebut.

Apabila terdapat Krektor dan/atau Pemegang Saham yang keberatan terhadap rencana pemekaran PT Trijaya Anugrah Estetika (Dalam Likuidasi) dapat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu usulan yang diajukan adalah nama Suhajar Diantoro sebagai calon penjabat Gubernur, dan nama-nama bupati/walikota lain di daerah-daerah yang akan berakhir jabatannya pada tahun 2022.

dalam menetapkan pejabat kepala daerah setingkat Gubernur terdapat mekanisme dan aturan yang sudah ditetapkan Kemendagri. Untuk nama calon yang akan mengisi jabatan Gubernur itu, nantinya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bakal mengusulkan dan membahasnya bersama dengan Presiden Joko Widodo.

Presiden, kata Suhajar, akan mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) terkait siapa calon yang diumumkan Mendagri untuk menjabat sebagai pejabat Gubernur itu. “Mekanismenya sudah ada ya, aturan-aturannya sudah jelas, untuk Gubernur nanti Menteri Dalam Negeri akan melapor kepada Pak Presiden, mengusulkan kepada Pak Presiden, berdiskusi dengan Pak Presiden,

meminta arahan bapak Presiden” kata Suhajar. “Nanti penetapan Gubernur, tentunya dengan keputusan Presiden untuk Pj gubernurnya,” ucap dia. Mereka adalah Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar, dan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Namun, Sekjen Kemendagri itu enggan menyebutkan siapa nama calon pejabat yang akan mengisi posisi Gubernur di lima provinsi tersebut.

“Lima Gubernur itu yang mengusulkan itu Menteri Dalam Negeri, masih dalam proses,” tuturnya. ● **mei**

Table with 2 main columns: LAPORAN POSISI KEUANGAN and LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Includes sub-sections like LIABILITAS DAN EKUITAS, PENDAPATAN USAHA, and BEBAN USAHA.

PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK

Financial statement table for PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk and subsidiaries. Includes columns for 31 DESEMBER 2021 and 31 DESEMBER 2020, and sub-sections for ASET LANCAR, LIABILITAS DAN EKUITAS, and PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN.

PENGUMUMAN RENCANA PEMBAYARAN KEUANGAN HASIL LIKUIDASI PT TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA (DALAM LIKUIDASI) Sehubungan dengan rencana pembagian dalam likuidasi PT Trijaya Anugrah Estetika (Dalam Likuidasi) maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf (c), dan (d) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam rangka pembayaran kepada Para Kreditor, dan pembayaran sisa keuangannya kepada Para Pemegang Saham, Dengan ini diberitahakan kepada Para Kreditor dan Para Pemegang Saham bahwa daftar rencana pembagian telah disetujui oleh Tim Likuidator pada 22 April 2022, dan dapat dilihat di Kantor Tim Likuidator PT Trijaya Anugrah Estetika (Dalam Likuidasi) bertempat di: Retha Agrirama Partnership, The H Tower, 12th Floor, 12-13, HR. Ratusua Sakti Kav. 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, 12940.

REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi bermaksud melakukan penawaran umum REKSA DANA PT SYAILENDRA CAPITAL ("REKSA DANA") dengan rincian sebagai berikut:

SYAILENDRA logo and information. Includes details about the company, management, and contact information for PT TAYO BIOMASS INDONESIA.

Continuation of the financial statement table for PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk, including the LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN section.